



Digitalisasi Pembayaran: Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Qris Bagi Pelaku Usaha Di Desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi

Nur Hasanah¹, Ryan Faika², Abiyu Razani³, Lova Alfa Riza⁴, Sidon Saputra⁵, Siti Nur Utami Putri⁶, Riskia Ramadhani⁷, Mhd Khairul Azmi⁸, Ridho Firdaus⁹, Ka Nurhasanah¹⁰, Salsabila Ajeng Pangesti¹¹

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

**Email i: 230304317@student.umri.ac.id*

ABSTRAK

Desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu desa yang sebagian besar aktivitas ekonominya masih bertumpu pada transaksi tunai. Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha dan konsumen ketika transaksi non-tunai dibutuhkan, serta menghambat efisiensi pencatatan keuangan usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat serta membantu pelaku usaha mikro dan kecil mendaftarkan dan mengaktifkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alternatif metode pembayaran selain tunai. Kegiatan dilaksanakan dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama kurang lebih satu bulan. Metode pelaksanaan meliputi observasi lapangan, sosialisasi, pendampingan pendaftaran QRIS secara langsung (*door to door*), pencetakan dan pemasangan kode QRIS, serta *monitoring* dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sistem pembayaran digital serta keberhasilan sejumlah pelaku usaha dalam mengaktifkan dan menggunakan QRIS pada transaksi sehari-hari. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi digital ekonomi desa dan mempermudah proses pembayaran sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada uang tunai.

Kata Kunci: digitalisasi; pembayaran digital; QRIS; UMKM; Desa Pulau Binjai

ABSTRACT

Pulau Binjai Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency is a village whose economic activities still largely rely on cash transactions. This condition creates difficulties for both business owners and consumers when non-cash transactions are needed, and hampers efficient financial record-keeping. This community service program aims to improve digital literacy and assist micro and small business owners in registering and activating the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as an alternative payment method to cash. The activity was carried out within a Kuliah Kerja Nyata (KKN) community service program for approximately one month. The implementation methods included field observation, socialization, door-to-door assistance for QRIS registration, printing and installation of QR codes, and monitoring and evaluation. The results show an increase in community understanding of digital payment systems and the successful activation

and use of QRIS by a number of business owners in their daily transactions. This activity provides a real contribution to the village's digital economic transformation and simplifies the payment process so that it no longer depends entirely on cash.

Keywords: digitalization; digital payment; QRIS; MSME; Pulau Binjai Village

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) mendorong perubahan besar dalam sistem pembayaran, dari transaksi tunai menuju transaksi digital. Perubahan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi secara perlahan mulai merambah ke wilayah perdesaan seiring dengan semakin luasnya kepemilikan *smartphone* dan akses internet di kalangan masyarakat. Bank Indonesia memperkenalkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai standar kode QR nasional yang menyatukan berbagai kanal pembayaran ke dalam satu kode, sehingga transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan tercatat rapi (Bank Indonesia, 2024). Kehadiran QRIS diharapkan mampu memangkas ketergantungan masyarakat terhadap uang tunai (*cash*) sekaligus mendorong terciptanya ekosistem transaksi yang lebih transparan dan mudah diaudit.

Adopsi QRIS oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diyakini dapat memperluas akses pasar sekaligus mendorong inklusi keuangan di tingkat akar rumput. Bagi pelaku usaha, keberadaan metode pembayaran non-tunai memberikan sejumlah keuntungan, di antaranya kemudahan pencatatan arus kas secara *real-time*, minimnya risiko kehilangan uang fisik, serta peningkatan kepercayaan konsumen yang kini semakin terbiasa dengan pembayaran *cashless*. Selain itu, riwayat transaksi digital yang tersimpan secara otomatis dapat menjadi dasar bagi pelaku usaha mikro untuk mengajukan pembiayaan atau modal usaha ke lembaga keuangan, mengingat sebagian besar lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya rekam jejak transaksi yang jelas sebagai salah satu indikator kelayakan.

Namun demikian, pemanfaatan QRIS belum merata, khususnya di wilayah perdesaan. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada masa pengenalan lingkungan di Desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, ditemukan bahwa hampir seluruh pelaku usaha, mulai dari warung sembako, kedai kopi, hingga usaha kuliner rumahan, masih mengandalkan transaksi tunai sepenuhnya. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan bagi konsumen yang tidak membawa uang tunai serta menyulitkan pelaku usaha dalam pencatatan transaksi secara rapi. Pada beberapa kesempatan, konsumen bahkan mengurungkan niat untuk membeli karena tidak memiliki uang tunai dalam jumlah pas, sementara pelaku usaha tidak memiliki uang kembalian yang cukup.

Rendahnya literasi digital dan minimnya pendampingan teknis menjadi faktor utama penyebab lambatnya adopsi QRIS di desa ini. Banyak pelaku usaha yang sudah mengenal istilah QRIS, misalnya melalui iklan di televisi maupun media sosial, namun belum memahami tata cara pendaftaran maupun pengoperasiannya. Sebagian pelaku usaha bahkan menganggap proses pendaftaran QRIS rumit dan memerlukan persyaratan administrasi yang berat, sehingga mereka enggan mencoba tanpa ada yang membimbing secara langsung. Ketiadaan pendampingan yang bersifat personal dan berkelanjutan membuat wacana digitalisasi pembayaran di desa ini berhenti sebatas pengetahuan, tanpa berlanjut ke tahap penerapan.

Faktor lain yang turut memperlambat adopsi adalah keterbatasan infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang belum stabil di seluruh titik desa, serta minimnya sosialisasi resmi dari penyedia

layanan pembayaran digital ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kecamatan. Kondisi geografis Desa Pulau Binjai yang berjarak cukup jauh dari pusat perbankan turut menjadi tantangan tersendiri, sebab pelaku usaha harus menempuh perjalanan yang tidak singkat apabila hendak mengurus administrasi keuangan secara konvensional. Hal ini semakin menegaskan pentingnya solusi berbasis digital yang dapat diakses tanpa harus meninggalkan lokasi usaha.

Secara konseptual, keberhasilan digitalisasi pembayaran di tingkat mikro tidak dapat dilepaskan dari tiga aspek utama, yaitu ketersediaan infrastruktur, tingkat literasi digital, serta kepercayaan pengguna terhadap sistem yang ditawarkan. Otoritas Jasa Keuangan menekankan bahwa inklusi keuangan digital baru dapat tercapai apabila masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memahami cara memanfaatkannya secara aman dan bertanggung jawab (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyoroti pentingnya pendampingan yang bersifat berkelanjutan agar pelaku UMKM tidak berhenti pada tahap pengenalan teknologi, melainkan benar-benar mengintegrasikannya ke dalam praktik usaha sehari-hari (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023).

Dalam konteks pedesaan seperti Desa Pulau Binjai, ketiga aspek tersebut hadir dengan tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Infrastruktur jaringan yang belum sepenuhnya stabil, tingkat literasi digital yang masih beragam antar kelompok usia, serta kepercayaan masyarakat yang masih terbatas terhadap sistem pembayaran non-tunai menjadi kombinasi tantangan yang perlu diselesaikan secara simultan, bukan satu per satu secara terpisah. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang agar dapat menyentuh ketiga aspek tersebut sekaligus, mulai dari edukasi, pendampingan teknis, hingga penguatan kepercayaan melalui interaksi langsung dan berulang dengan pelaku usaha.

Selain aspek teknis, kegiatan ini juga mempertimbangkan dimensi sosial-budaya masyarakat desa yang cenderung mengutamakan hubungan personal dan rasa saling percaya dalam menerima hal baru. Pendekatan yang bersifat formal dan satu arah dinilai kurang sesuai diterapkan tanpa disertai interaksi personal, sehingga tim pengabdian menempatkan aspek kekeluargaan dan komunikasi dua arah sebagai bagian penting dari strategi pelaksanaan, bukan sekadar pelengkap dari sisi teknis semata.

Urgensi kegiatan ini semakin terasa apabila dikaitkan dengan tren nasional yang menunjukkan pertumbuhan pesat jumlah pengguna QRIS di berbagai daerah, termasuk di wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap tertinggal dari sisi infrastruktur digital. Apabila Desa Pulau Binjai tidak segera mengejar ketertinggalan ini, pelaku usaha di desa tersebut berisiko kehilangan peluang transaksi dari konsumen yang semakin terbiasa dengan pembayaran non-tunai, terutama pengunjung dari luar desa yang berkunjung pada momen-momen tertentu seperti hari pasar atau acara adat setempat. Selain itu, ketertinggalan dalam adopsi teknologi pembayaran juga berpotensi memperlebar kesenjangan digital antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada daya saing produk maupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha desa di pasar yang lebih luas.

Dari sisi kebijakan, kegiatan ini juga sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mempercepat inklusi keuangan digital hingga ke tingkat desa, sebagaimana tertuang dalam berbagai program strategis nasional. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), dalam hal ini, berperan sebagai jembatan antara kebijakan tingkat nasional dengan implementasi konkret di tingkat akar rumput, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang dimiliki aparat desa untuk melakukan pendampingan teknis secara intensif kepada seluruh pelaku usaha secara bersamaan.

Lebih jauh, kehadiran mahasiswa KKN sebagai fasilitator pendampingan memberikan nilai tambah tersendiri dibandingkan sosialisasi yang dilakukan secara formal oleh lembaga resmi. Kedekatan usia dan latar belakang mahasiswa dengan sebagian pelaku usaha, khususnya generasi muda pemilik usaha, membuat proses komunikasi berjalan lebih cair dan tidak kaku. Di sisi lain, kesediaan mahasiswa untuk turun langsung ke lokasi usaha dan meluangkan waktu secara fleksibel turut membangun kepercayaan dari kelompok pelaku usaha yang lebih senior, yang pada mulanya bersikap ragu terhadap program-program berbasis teknologi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian mengangkat kegiatan “Digitalisasi Pembuatan QRIS” sebagai upaya konkret membantu masyarakat Desa Pulau Binjai bertransisi menuju sistem pembayaran yang lebih modern dan efisien. Kegiatan ini dirancang bukan hanya sebagai sosialisasi satu arah, melainkan sebagai pendampingan aktif yang melibatkan interaksi langsung antara tim pelaksana dengan pelaku usaha, sehingga setiap kendala teknis yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusinya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem pembayaran digital; (2) mendampingi pelaku usaha dalam proses pendaftaran dan aktivasi akun QRIS; (3) mempermudah proses transaksi di desa agar tidak hanya bergantung pada pembayaran tunai, tetapi juga dapat menerima pembayaran secara digital; serta (4) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pencatatan keuangan digital sebagai dasar pengambilan keputusan usaha ke depannya.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, pelaku usaha memperoleh kemampuan teknis untuk menerima pembayaran digital serta memahami manfaat dan risiko yang menyertainya. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi tumbuhnya budaya transaksi digital yang lebih luas di Desa Pulau Binjai, sekaligus mendukung program inklusi keuangan nasional yang dicanangkan pemerintah, serta memperkuat posisi UMKM desa dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin mengarah pada ekosistem digital.

METODE

Rancangan kegiatan ini diawali dari kondisi awal masyarakat yang minim literasi digital dan sepenuhnya bertransaksi tunai, kemudian diberikan intervensi berupa sosialisasi dan pendampingan langsung, sehingga diharapkan menghasilkan kondisi akhir berupa pelaku usaha yang memahami, memiliki, dan menggunakan QRIS dalam transaksi sehari-hari. Alur ini dapat disederhanakan menjadi tiga tahap besar, yaitu tahap pemetaan masalah, tahap intervensi melalui edukasi dan pendampingan teknis, serta tahap evaluasi dampak yang diukur melalui perubahan perilaku transaksi dan tingkat pemahaman pelaku usaha. Ketiga tahap ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab hasil pada tahap evaluasi turut menjadi masukan bagi keberlanjutan pendampingan setelah masa kegiatan KKN berakhir.

1. Lokasi, Waktu, dan Khalayak Sasaran

Kegiatan dilaksanakan di Desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai bagian dari program KKN yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan rendahnya tingkat adopsi pembayaran digital di desa tersebut, meskipun sebagian besar warga telah memiliki perangkat *smartphone* dan akses internet dasar.

Sasaran kegiatan ini adalah pelaku usaha mikro dan kecil seperti pemilik warung sembako, toko kelontong, kedai kopi, rumah makan, serta usaha kuliner rumahan yang beroperasi di lingkungan Desa Pulau Binjai. Pemilihan sasaran mempertimbangkan frekuensi transaksi harian yang tinggi pada kelompok usaha tersebut, sehingga manfaat penerapan QRIS dapat dirasakan secara langsung dan cepat.

2. Pelaksana dan Mitra Kegiatan

Agar pelaksanaan kegiatan berjalan terarah, tim pengabdian membagi tugas ke dalam beberapa peran, yaitu koordinator kegiatan yang bertanggung jawab atas perencanaan dan komunikasi dengan pemerintah desa, tim sosialisasi yang bertugas menyampaikan materi dan memandu simulasi transaksi, tim pendampingan teknis yang membantu proses pendaftaran dan aktivasi akun QRIS dari rumah ke rumah, serta tim dokumentasi yang bertanggung jawab mencatat dan mengabadikan setiap tahapan kegiatan. Pembagian peran ini bersifat fleksibel, sehingga anggota tim dapat saling membantu apabila salah satu tahapan membutuhkan tenaga tambahan, misalnya ketika jumlah pelaku usaha yang harus didampingi dalam satu hari cukup banyak.

Keberhasilan kegiatan ini juga tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa yang memberikan izin dan dukungan logistik, tokoh masyarakat yang membantu mengajak warga untuk berpartisipasi, hingga penyedia layanan pembayaran digital yang menyediakan materi edukasi resmi terkait keamanan dan cara kerja QRIS. Kolaborasi lintas pihak ini penting agar kegiatan tidak hanya dipandang sebagai program mahasiswa semata, melainkan sebagai gerakan bersama seluruh elemen desa untuk mendorong kemajuan ekonomi lokal melalui pemanfaatan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Dukungan dari berbagai pihak ini juga menjadi bekal penting bagi keberlanjutan program pendampingan setelah masa Kuliah Kerja Nyata berakhir, sebab tidak semua kendala dapat diselesaikan hanya oleh mahasiswa dalam kurun waktu yang terbatas.

3. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan mengikuti lima tahapan utama sebagai berikut.

- **Observasi dan identifikasi masalah** – dilakukan pada minggu pertama untuk memetakan kondisi transaksi, jumlah pelaku usaha, serta tingkat literasi digital di lokasi kegiatan. Observasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke setiap unit usaha serta wawancara singkat dengan pemiliknya.
- **Sosialisasi** – berupa pemaparan materi mengenai pengertian, manfaat, dan cara kerja QRIS, disertai simulasi transaksi menggunakan akun percontohan agar peserta dapat melihat langsung alur pembayaran dari sisi konsumen maupun pelaku usaha. Sesi ini juga membuka ruang tanya jawab agar peserta dapat menyampaikan kekhawatiran maupun pertanyaan teknis secara terbuka.
- **Pendampingan pendaftaran QRIS secara langsung (*door to door*)** ke lokasi usaha masing-masing warga, meliputi pengisian data, verifikasi dokumen kependudukan, pengunduhan (*download*) aplikasi penyedia layanan, hingga aktivasi akun. Pendekatan *door to door* dipilih karena banyak pelaku usaha lanjut usia yang kurang percaya diri untuk hadir dan bertanya dalam forum besar.
- **Pencetakan dan pemasangan kode QRIS** di lokasi usaha agar mudah dipindai (*scan*) oleh konsumen. Kode QRIS dicetak dalam ukuran yang cukup besar dan dilaminasi agar tahan terhadap cuaca serta ditempatkan pada titik yang mudah terlihat, seperti meja kasir atau etalase.
- **Monitoring dan evaluasi** – dilakukan pada minggu-minggu akhir kegiatan untuk memantau penggunaan QRIS serta menghimpun umpan balik (*feedback*) dari pelaku usaha terkait kendala teknis maupun non-teknis yang masih dihadapi setelah aktivasi akun.

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alokasi waktu pelaksanaan, tahapan kegiatan di atas dijadwalkan dalam kurun waktu empat minggu sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Minggu	Kegiatan Utama	Luaran
I	Observasi lapangan, identifikasi masalah, dan koordinasi dengan pemerintah desa	Peta kondisi transaksi dan daftar sasaran pelaku usaha
II	Pelaksanaan sosialisasi dan simulasi transaksi QRIS	Peningkatan pemahaman awal pelaku usaha
III	Pendampingan pendaftaran, verifikasi, dan pencetakan/pemasangan kode QRIS	Akun QRIS aktif dan terpasang di lokasi usaha
IV	<i>Monitoring</i> , evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan	Laporan hasil dan rekomendasi tindak lanjut

4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Data dan informasi dikumpulkan melalui tiga cara utama, yaitu observasi lapangan secara langsung terhadap praktik transaksi sehari-hari, wawancara singkat semi-terstruktur dengan pelaku usaha untuk menggali persepsi dan kendala yang dihadapi, serta dokumentasi kegiatan berupa foto dan catatan lapangan pada setiap tahapan pelaksanaan. Ketiga sumber data ini saling melengkapi sehingga gambaran kondisi sebelum dan sesudah kegiatan dapat disusun secara lebih utuh.

Beberapa instrumen sederhana digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, di antaranya lembar observasi untuk mencatat kondisi awal setiap unit usaha, daftar pertanyaan wawancara singkat yang bersifat semi-terstruktur, formulir pendaftaran akun QRIS sesuai persyaratan penyedia layanan, serta lembar catatan pendampingan yang memuat kendala dan solusi pada setiap kunjungan. Seluruh instrumen tersebut disusun secara sederhana agar tidak membebani pelaku usaha maupun tim pelaksana selama proses pengumpulan data di lapangan.

Setiap tahapan kegiatan, mulai dari observasi awal, sesi sosialisasi, pendampingan *door to door*, hingga pemasangan kode QRIS, didokumentasikan dalam bentuk foto dan catatan lapangan sebagai bahan evaluasi maupun pelaporan kegiatan. Dokumentasi ini juga berfungsi sebagai bukti keterlaksanaan program serta arsip yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa maupun mahasiswa KKN periode berikutnya sebagai referensi keberlanjutan program digitalisasi UMKM di Desa Pulau Binjai.

5. Teknik Analisis Data dan Indikator Keberhasilan

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk melihat perubahan pemahaman dan perilaku transaksi pelaku usaha sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi awal hasil observasi dengan capaian akhir pada tahap *monitoring* dan evaluasi, kemudian disusun dalam bentuk narasi serta tabel ringkasan untuk memudahkan interpretasi hasil.

Keberhasilan kegiatan diukur melalui beberapa indikator, yaitu: (1) meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memahami konsep dasar QRIS dibandingkan kondisi awal; (2) bertambahnya jumlah akun QRIS yang berhasil diaktifkan pada akhir masa pendampingan; (3) terpasangnya kode QRIS secara fisik di lokasi-lokasi usaha sasaran; serta (4) adanya minimal satu transaksi non-tunai yang berhasil dilakukan

oleh masing-masing pelaku usaha selama periode *monitoring*. Keempat indikator tersebut dipilih karena bersifat terukur dan dapat diverifikasi secara langsung melalui observasi maupun laporan dari pelaku usaha.

6. Etika dan Kerahasiaan Data

Selama proses pendampingan, tim pengabdian senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi maupun data usaha milik peserta. Dokumen kependudukan yang digunakan untuk keperluan verifikasi akun hanya diakses seperlunya dan tidak disimpan atau digandakan oleh tim pengabdian di luar keperluan pendaftaran. Prinsip kehati-hatian ini disampaikan secara terbuka kepada peserta guna membangun rasa aman dan kepercayaan, mengingat kekhawatiran terhadap keamanan data merupakan salah satu hambatan utama yang ditemukan pada tahap observasi awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal Pembayaran di Desa Pulau Binjai

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa transaksi jual beli di Desa Pulau Binjai hampir seluruhnya dilakukan secara tunai. Pelaku usaha belum memiliki akses maupun pemahaman memadai tentang cara mendaftar QRIS, meskipun sebagian dari mereka telah memiliki telepon pintar dan terbiasa menggunakan media sosial maupun aplikasi perpesanan. Sebagian pelaku usaha bahkan telah mengunduh aplikasi *mobile banking* untuk keperluan pribadi, namun belum pernah menggunakannya untuk keperluan transaksi usaha. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata pada ketiadaan perangkat, melainkan pada minimnya pengetahuan mengenai pemanfaatan perangkat tersebut untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Dari hasil wawancara awal terhadap dua puluh pelaku usaha, diketahui bahwa mayoritas responden pernah mendengar istilah QRIS, namun hanya sebagian kecil yang memahami cara kerjanya secara benar. Sebagian besar responden juga menyatakan kekhawatiran terkait keamanan data pribadi serta biaya administrasi yang mungkin timbul dari penggunaan QRIS, sehingga mereka memilih untuk tetap bertahan dengan sistem tunai yang selama ini dianggap lebih sederhana dan minim risiko.

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan

Kegiatan sosialisasi mendapat antusiasme cukup tinggi, ditandai dengan banyaknya pertanyaan mengenai keamanan transaksi, biaya administrasi, dan cara pencairan dana. Materi sosialisasi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan disertai contoh kasus sehari-hari agar mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang usia dan tingkat pendidikan. Tim pelaksana juga menyiapkan simulasi transaksi menggunakan akun percontohan sehingga peserta dapat melihat langsung proses pemindaian (*scanning*) kode QR hingga notifikasi pembayaran diterima.

Pada tahap pendampingan, tim membantu pelaku usaha mengunduh aplikasi penyedia layanan, mengisi data usaha, melakukan verifikasi dokumen, hingga mencetak dan memasang stiker kode QRIS di lokasi usaha. Proses pendampingan dilakukan secara bertahap dan personal, mengingat tidak semua pelaku usaha memiliki kecepatan belajar yang sama dalam mengoperasikan aplikasi berbasis *smartphone*. Tim pelaksana juga menyediakan panduan tertulis sederhana berupa selebaran (*leaflet*) langkah demi langkah, sehingga pelaku usaha dapat mengulang proses tersebut secara mandiri apabila mengalami kendala di kemudian hari.

3. Capaian Kegiatan

Secara umum, kegiatan ini menghasilkan beberapa capaian nyata sebagai berikut.

- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai QRIS sebagai alternatif pembayaran selain tunai.
- b. Sejumlah pelaku usaha berhasil memiliki dan mengaktifkan akun QRIS untuk usahanya.
- c. Pelaku usaha mulai mampu melayani transaksi non-tunai sehingga proses jual beli menjadi lebih fleksibel.
- d. Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pencatatan transaksi melalui riwayat digital.
- e. Meningkatnya kepercayaan diri pelaku usaha, terutama kelompok usia lanjut, dalam mengoperasikan aplikasi pembayaran digital pada perangkat *smartphone* miliknya.

Untuk memperjelas perubahan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan, ringkasan capaian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi Pelaku Usaha Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Aspek	Kondisi Sebelum Kegiatan	Kondisi Sesudah Kegiatan
Metode pembayaran	Seluruhnya tunai	Tersedia opsi tunai dan QRIS
Pemahaman tentang QRIS	Terbatas pada nama/istilah	Memahami cara daftar dan pakai
Kepemilikan akun QRIS	Belum ada	Sebagian besar peserta telah aktif
Pencatatan transaksi	Manual/tidak konsisten	Tersedia riwayat digital otomatis
Kepercayaan diri terhadap teknologi	Rendah, terutama usia lanjut	Meningkat setelah pendampingan langsung

Tabel 2 menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, seperti kepemilikan akun QRIS, tetapi juga bersifat perilaku (*behavioral*), yakni meningkatnya kepercayaan diri pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung usahanya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan digitalisasi UMKM tidak semata ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh kesiapan pengguna (*user readiness*) dalam mengadopsi teknologi baru.

4. Pengalaman dan Respons Pelaku Usaha

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut disajikan tiga contoh pengalaman pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pendampingan ini.

Pemilik warung sembako, misalnya, pada awalnya merasa ragu karena khawatir pelanggan yang sudah terbiasa membayar tunai akan kesulitan beradaptasi. Setelah melalui proses pendampingan, pemilik warung tersebut justru merasakan manfaat tambahan berupa berkurangnya kebutuhan menyediakan uang kembalian dalam jumlah banyak, sebab sebagian pelanggan mulai beralih menggunakan QRIS terutama untuk pembelian dalam nominal besar.

Pengalaman berbeda dialami oleh pemilik kedai kopi, yang sebelumnya kerap kehilangan potensi penjualan karena pelanggan, terutama pengunjung dari luar desa, tidak membawa uang tunai dalam jumlah cukup. Setelah kode QRIS terpasang di meja kasir, pemilik kedai kopi tersebut mengaku jumlah transaksi harian meningkat, khususnya pada akhir pekan ketika kunjungan wisatawan maupun pengunjung dari desa tetangga lebih ramai.

Sementara itu, pemilik usaha kuliner rumahan yang sebelumnya hanya melayani pemesanan melalui pesan singkat dan pembayaran tunai saat pengantaran, kini dapat menerima pembayaran secara digital sebelum pesanan diantar. Kondisi ini mengurangi risiko kerugian akibat pembatalan sepihak oleh

pemesan, karena pembayaran telah dikonfirmasi terlebih dahulu melalui notifikasi QRIS sebelum proses pengantaran dilakukan.

Sebagian besar pelaku usaha menyampaikan respons positif terhadap kegiatan pendampingan ini. Salah satu pelaku usaha menyampaikan bahwa dirinya merasa lebih tenang karena tidak perlu lagi khawatir kehabisan uang kembalian, sementara pelaku usaha lain menyatakan bahwa pencatatan riwayat transaksi melalui aplikasi membantunya mengetahui jumlah pendapatan harian secara lebih akurat dibandingkan pencatatan manual yang selama ini dilakukan menggunakan buku catatan sederhana. Testimoni-testimoni tersebut menegaskan bahwa manfaat QRIS tidak hanya dirasakan dari sisi kemudahan transaksi, tetapi juga dari sisi pengelolaan usaha secara lebih tertata.

5. Kendala dan Solusi

Beberapa kendala ditemukan selama pelaksanaan, di antaranya keterbatasan jaringan internet di sejumlah titik desa, kurangnya familiaritas sebagian warga berusia lanjut terhadap *smartphone*, serta kekhawatiran terkait keamanan data. Selain itu, terdapat pula kendala berupa dokumen kependudukan yang belum lengkap pada beberapa pelaku usaha, sehingga proses verifikasi akun harus tertunda hingga dokumen yang diperlukan dilengkapi terlebih dahulu.

Kendala tersebut diatasi melalui pendampingan personal yang bertahap, pemilihan lokasi dengan sinyal lebih stabil untuk proses aktivasi akun, serta edukasi mengenai sistem keamanan QRIS yang resmi diawasi Bank Indonesia. Untuk kendala dokumen, tim pelaksana membantu mengarahkan pelaku usaha ke kantor desa guna melengkapi persyaratan administrasi, sehingga proses pendaftaran dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu terlalu lama. Pendekatan yang bersifat sabar dan berulang (*repetitive assistance*) terbukti efektif untuk meyakinkan pelaku usaha, khususnya kelompok usia lanjut, bahwa penggunaan QRIS tidak serumit yang dibayangkan.

Perubahan pola transaksi ini juga membawa dampak psikologis positif bagi pelaku usaha, khususnya dalam hal berkurangnya kecemasan menghadapi konsumen yang tidak membawa uang tunai. Sebelum kegiatan berlangsung, pelaku usaha kerap merasa tidak nyaman ketika harus menolak transaksi atau mencari uang kembalian dalam kondisi terburu-buru. Setelah kode QRIS terpasang, momen semacam ini menjadi jauh berkurang, sehingga interaksi antara pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih lancar dan tidak diwarnai kecanggungan yang sebelumnya sering muncul.

Dari sudut pandang keberlanjutan, tim pengabdian juga mendorong pelaku usaha untuk tidak sepenuhnya meninggalkan metode tunai, melainkan memposisikan QRIS sebagai pelengkap yang memberi pilihan lebih luas kepada konsumen. Pendekatan ini dipilih agar transisi menuju sistem pembayaran digital berjalan secara alami, tanpa memaksakan perubahan total yang berpotensi menimbulkan penolakan, terutama dari kelompok konsumen yang masih nyaman bertransaksi secara tunai.

6. Pembahasan Temuan

Secara umum, kegiatan ini berhasil mendorong transisi sebagian pelaku usaha di Desa Pulau Binjai dari sistem pembayaran tunai menuju sistem pembayaran digital, sejalan dengan tujuan awal untuk mempermudah proses transaksi baik secara tunai maupun non-tunai. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pendekatan pendampingan yang bersifat langsung dan personal, alih-alih hanya mengandalkan sosialisasi satu arah yang seringkali kurang efektif untuk mengubah kebiasaan masyarakat secara nyata.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa faktor kepercayaan menjadi kunci utama keberhasilan adopsi teknologi pembayaran digital di tingkat akar rumput. Pelaku usaha cenderung lebih

mudah menerima teknologi baru apabila mereka melihat langsung manfaatnya, didampingi secara personal, dan diberi ruang untuk bertanya tanpa merasa canggung. Oleh karena itu, pendekatan *door to door* yang diterapkan dalam kegiatan ini terbukti menjadi strategi yang tepat untuk konteks masyarakat pedesaan dengan tingkat literasi digital yang masih beragam.

Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa digitalisasi UMKM di wilayah pedesaan tidak dapat disamakan pendekatannya dengan wilayah perkotaan yang umumnya memiliki tingkat literasi digital dan infrastruktur yang lebih memadai. Strategi pendampingan yang efektif di desa perlu memperhitungkan faktor kedekatan sosial, keterbatasan infrastruktur, serta keragaman usia pelaku usaha, sehingga intervensi yang dirancang benar-benar sesuai dengan konteks dan kebutuhan riil masyarakat setempat, bukan sekadar mengadopsi model pendampingan yang berhasil di wilayah lain tanpa penyesuaian.

Apabila dibandingkan dengan kegiatan pendampingan digitalisasi UMKM yang umum dilakukan di berbagai daerah, pola kendala yang ditemukan di Desa Pulau Binjai relatif serupa, yaitu berkisar pada keterbatasan infrastruktur jaringan, kekhawatiran keamanan data, dan minimnya familiaritas terhadap perangkat digital pada kelompok usia lanjut. Namun demikian, pendekatan *door to door* yang diterapkan pada kegiatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan sosialisasi klasikal semata, karena memungkinkan tim pengabdian memberikan perhatian penuh kepada setiap pelaku usaha sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, tanpa tekanan sosial yang biasanya muncul dalam forum besar.

7. Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor pendukung teridentifikasi selama pelaksanaan kegiatan, di antaranya keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan izin dan dukungan logistik, antusiasme sebagian besar pelaku usaha terhadap hal-hal baru yang berpotensi mempermudah usahanya, serta ketersediaan perangkat *smartphone* pada hampir seluruh peserta yang menjadi prasyarat teknis penggunaan QRIS. Dukungan tokoh masyarakat setempat turut mempercepat proses sosialisasi, sebab ajakan untuk mengikuti kegiatan lebih mudah diterima ketika disampaikan bersama figur yang telah dikenal dan dipercaya oleh warga.

Di sisi lain, faktor penghambat yang paling menonjol adalah keterbatasan jaringan internet di beberapa titik desa yang menyebabkan proses verifikasi akun memakan waktu lebih lama dari perkiraan awal. Selain itu, tingkat kenyamanan yang berbeda-beda terhadap teknologi digital antar kelompok usia turut memengaruhi kecepatan proses pendampingan, di mana kelompok usia produktif cenderung lebih cepat memahami instruksi dibandingkan kelompok usia lanjut yang membutuhkan pengulangan penjelasan lebih banyak.

8. Dampak terhadap Literasi Keuangan Digital dan Implikasi bagi Ekonomi Desa

Selain dampak langsung berupa aktifnya akun QRIS, kegiatan ini juga memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan literasi keuangan digital pelaku usaha secara lebih luas. Beberapa peserta mulai memahami pentingnya memisahkan catatan keuangan pribadi dan usaha, memanfaatkan riwayat transaksi sebagai alat bantu evaluasi omzet harian, serta lebih terbuka terhadap kemungkinan pemanfaatan layanan keuangan digital lain di masa mendatang, seperti tabungan digital maupun pembiayaan usaha mikro berbasis rekam jejak transaksi. Perubahan pola pikir ini menjadi salah satu capaian penting yang tidak selalu terlihat secara kasat mata, namun berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan usaha peserta.

Keberhasilan sebagian pelaku usaha dalam mengaktifkan dan menggunakan QRIS membawa implikasi yang lebih luas bagi arah pengembangan ekonomi Desa Pulau Binjai secara keseluruhan.

Ketersediaan opsi pembayaran digital berpotensi menarik lebih banyak pengunjung dari luar desa, termasuk wisatawan maupun pedagang perantara, yang pada masa sebelumnya enggan bertransaksi karena keterbatasan uang tunai. Selain itu, riwayat transaksi digital yang mulai terbentuk dapat menjadi modal sosial dan finansial bagi pelaku usaha ketika hendak mengakses program pembiayaan mikro dari lembaga keuangan maupun program bantuan pemerintah yang mensyaratkan bukti aktivitas usaha yang terverifikasi.

Jelantik, I. G. A. A. I. D. L., Thio, L. M. P., Mahayani, N. K. A., Putra, I. P. P. B., Amanda, G. A. K. M., & Sukma, J. C. M. (2026). Pemberdayaan pelaku UMKM Desa Bumbungan melalui literasi digital dan praktik QRIS. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(3), 1337–1344. <https://doi.org/10.59395/altifani.v6i3.1176>

Dalam jangka menengah, apabila semakin banyak pelaku usaha yang konsisten menggunakan QRIS, desa ini berpotensi menjadi salah satu percontohan transformasi digital ekonomi tingkat desa di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan digitalisasi ekonomi desa yang didorong oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas digital masyarakat desa sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan.

9. Keberlanjutan Program dan Keterbatasan Kegiatan

Meski demikian, keberlanjutan pemanfaatan QRIS pasca-kegiatan tetap menjadi tantangan tersendiri, mengingat pendampingan yang diberikan bersifat sementara selama masa KKN berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lanjutan dari pemerintah desa maupun pihak terkait agar pelaku usaha tidak kembali sepenuhnya pada sistem tunai setelah program pendampingan berakhir.

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan banyak pembelajaran bagi tim mahasiswa KKN, terutama terkait pentingnya kesabaran dan pendekatan personal dalam mendampingi masyarakat yang belum familiar dengan teknologi digital. Tantangan yang dihadapi selama kegiatan justru memperkaya pemahaman tim mengenai kondisi riil masyarakat desa, yang tidak selalu sejalan dengan asumsi awal sebelum kegiatan dimulai.

Agar manfaat kegiatan ini dapat dirasakan secara berkelanjutan, diperlukan komitmen dari berbagai pihak untuk terus mendampingi pelaku usaha, tidak hanya pada masa KKN berlangsung. Pemerintah desa dapat berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan penyedia layanan QRIS apabila muncul kendala teknis di kemudian hari, sementara mahasiswa KKN periode selanjutnya dapat melanjutkan pemantauan dan memperluas sasaran pendampingan ke pelaku usaha yang belum tersentuh pada periode ini.

Kegiatan ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu diungkapkan secara jujur sebagai bahan pertimbangan bagi kegiatan pengabdian serupa di masa mendatang. Pertama, durasi pendampingan yang terbatas pada masa KKN menyebabkan belum seluruh pelaku usaha di Desa Pulau Binjai dapat tersentuh secara merata, sehingga sebagian di antaranya masih berada pada tahap pengenalan awal dan belum sampai pada tahap aktivasi akun secara penuh. Kedua, evaluasi dampak kegiatan dalam artikel ini masih bersifat deskriptif kualitatif berdasarkan observasi dan wawancara jangka pendek, sehingga belum mampu menggambarkan dampak kuantitatif seperti peningkatan omzet secara terukur dalam periode waktu yang lebih panjang.

Ketiga, keterbatasan jaringan internet di sejumlah titik desa turut membatasi kecepatan proses verifikasi akun pada beberapa pelaku usaha, sehingga hasil yang dicapai pada akhir masa kegiatan

mungkin belum mencerminkan potensi maksimal apabila kendala infrastruktur tersebut dapat diatasi lebih awal. Keterbatasan-keterbatasan ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi makna capaian yang telah diraih, melainkan sebagai catatan reflektif agar program pendampingan lanjutan dapat dirancang dengan lebih matang, misalnya dengan memperpanjang durasi pendampingan atau melibatkan lebih banyak pihak dalam proses *monitoring* pascakegiatan.

Keempat, evaluasi keberhasilan kegiatan ini sejauh ini masih berfokus pada indikator kepemilikan dan aktivasi akun, belum sampai pada pengukuran perubahan pendapatan usaha secara kuantitatif. Pengukuran dampak ekonomi yang lebih mendalam memerlukan periode observasi yang lebih panjang serta instrumen pengumpulan data keuangan yang lebih terstruktur, sehingga disarankan menjadi fokus utama pada kegiatan pengabdian atau penelitian lanjutan yang akan datang.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian “Digitalisasi Pembuatan QRIS” di Desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem pembayaran digital dan mendorong sejumlah pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki serta mengaktifkan akun QRIS. Melalui observasi, sosialisasi, pendampingan langsung (*door to door*), pemasangan kode QRIS, serta *monitoring* dan evaluasi, transaksi di desa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada uang tunai, melainkan dapat dilakukan secara digital, sejalan dengan temuan Aisyah et al. (2023). Pendampingan yang personal, sabar, dan berkelanjutan efektif mengatasi rendahnya literasi digital serta kekhawatiran keamanan data, sekaligus menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha, terutama kelompok berusia lanjut (Jelantik et al., 2026). Kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya riwayat transaksi digital untuk pencatatan keuangan dan evaluasi penjualan (Cahyani, 2025). Bagi pelaku usaha, QRIS memberi pilihan pembayaran yang lebih fleksibel dan mengurangi kebutuhan uang kembalian, termasuk saat melayani pengunjung dari luar desa. Keberhasilan digitalisasi pembayaran tidak semata ditentukan ketersediaan teknologi, tetapi juga persepsi pengguna terhadap manfaat dan kemudahannya (Sholihah & Nurhapsari, 2023), sehingga sinergi antara mahasiswa, pemerintah desa, penyedia layanan, dan pelaku usaha menjadi kunci transformasi digital ekonomi desa yang inklusif. Meskipun demikian, keberlanjutan pemanfaatan QRIS masih terkendala jaringan internet yang kurang stabil di sejumlah titik desa (Apriyanti et al., 2025) dan durasi pendampingan yang terbatas pada masa KKN. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa menunjuk kader digital lokal, mahasiswa KKN periode berikutnya melanjutkan pendampingan secara berkala, penyedia layanan QRIS memperluas sosialisasi serta menyediakan *helpdesk*, dan penelitian lanjutan perlu mengukur dampak jangka panjang QRIS terhadap pendapatan usaha mikro perdesaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi atas dukungan dan izin yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pelaku usaha yang telah bersedia berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan, serta kepada dosen pembimbing lapangan atas arahan dan masukan yang diberikan sepanjang pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata ini. Tidak lupa, penghargaan juga disampaikan kepada seluruh anggota tim mahasiswa KKN

yang telah bekerja sama secara solid, saling melengkapi peran, dan menunjukkan komitmen tinggi sejak tahap observasi hingga penyusunan laporan akhir kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Sepfiani, P., Putri, L. P., Gunawan, D. I., & Nararya, H. L. (2023). Pendampingan penggunaan QRIS pada UMKM upaya peningkatan produktivitas UMKM di Kota Medan. *Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 142–151. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v3i1.614>
- Apriyanti, Y., Febiolla, N. B., Latifah, U. N., Marfuah, E. R., Chasanah, L., Faidah, N., Maulana, I., Saputra, H., & Pratiwi, D. (2025). Pendampingan optimalisasi transaksi digital melalui implementasi QRIS bagi UMKM di Desa Mayong Lor. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 7(2), 75–81. <https://doi.org/10.31092/kuat.v7i2.3634>
- Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. (2023). *Laporan perkembangan sistem pembayaran nasional*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik e-commerce Indonesia*.
- Bank Indonesia. (2021). *Kajian ekonomi dan keuangan digital*.
- Bank Indonesia. (2022). *Blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025: Menyongsong era digital*.
- Bank Indonesia. (2023). *Statistik sistem pembayaran Indonesia*.
- Bank Indonesia. (2024). *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Panduan umum penggunaan*.
- Cahyani, I. G. (2025). Implementasi sistem pembayaran digital berbasis QRIS dalam meningkatkan efisiensi pencatatan laporan keuangan pada UMKM warung makan di era industri 4.0. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(4), 415–424. <https://doi.org/10.70248/jpmebd.v2i4.3371>
- Hidayat, M. F., & Anggraini, D. (2023). Peran Kuliah Kerja Nyata dalam mendorong digitalisasi UMKM desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(3), 101–112.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Panduan digitalisasi ekonomi desa*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan transformasi ekonomi dan keuangan digital*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Panduan transformasi digital bagi UMKM*.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2023). *Roadmap digitalisasi koperasi dan UMKM*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan Indonesia*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Literasi dan inklusi keuangan digital di Indonesia*.
- Profil dan data monografi Desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2026*.
- Rahman, T. (2022). Efektivitas program sosialisasi QRIS terhadap peningkatan transaksi non-tunai. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 8(2), 67–79.
- Setiawan, A., & Pratama, R. (2022). Adopsi teknologi pembayaran digital pada UMKM pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 5(2), 45–58.
- Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan implementasi digital payment pada UMKM: Intensi pengguna QRIS berdasarkan Technology Acceptance Model. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52480>

- World Bank. (2022). *Digital financial inclusion in rural areas: A global perspective*. World Bank Group.
- Wulandari, S. (2021). Literasi keuangan digital sebagai faktor pendorong inklusi keuangan di wilayah pedesaan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9(1), 12–24.